

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi ekonomi dan perubahan dalam konsep perencanaan nasional, terutama pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan penyusunan baru mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal ini merupakan salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan era baru dalam globalisasi ekonomi internasional dan era pelaksanaan otonomi daerah dalam tingkat nasional. Secara umum, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dalam mengelola pemerintahannya, daerah memerlukan penilaian untuk melihat apakah pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas, dan *value for money* (Mardiasmo, 2017). Transparansi keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transpansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan – kebutuhan hidup masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar –

benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Value for money menerapkan 3 (tiga) prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target – target atau tujuan kepentingan publik.

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Tujuannya untuk penilaian secara internal maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek domino yang positif yaitu mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen – komponen yang terdapat pada anggaran.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan beberapa rasio, yaitu rasio kemandirian merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi (Halim, 2007). Bila PAD yang diperoleh oleh

daerah tinggi maka presentase PAD dalam membiayai pelayanan pembangun juga tinggi, begitu pula sebaliknya (Florida, 2006). Rasio efektivitas pendapatan merupakan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007). Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah (Halim, 2007:234), dan rasio pertumbuhan pendapatan berfungsi dalam mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya dari tahun ke tahun (Halim, 2007).

Salah satu indikator keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan adalah keberhasilan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan hal ini akan membuka kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi disuatu daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Kinerja perekonomian setiap daerah dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi daerah (laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan).

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Periode 2017-2022

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)						Rata-Rata (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kerinci	5,86	4,93	4,23	3,81	3,89	4,43	5,36
Merangin	5,39	4,93	4,25	0,78	5,24	5,72	4,39
Sarolangun	4,68	4,8	4,26	-0,25	6,61	6,73	3,78
Batang Hari	4,81	4,83	5,07	-0,43	4,85	12,27	3,84
Muaro Jambi	4,95	5,01	4,79	0,35	4,06	7,97	4,1
Tanjabtlim	3,07	2,94	4,21	-3,44	0,14	0,57	1,95
Tanjabbar	4,48	6,77	5,01	-0,29	1,36	2,56	3,45
Tebo	5,58	4,98	4,76	-0,03	4,3	6,3	4,31
Bungo	5,68	4,65	4,19	-0,48	4,99	4,73	4,19
Kota Jambi	4,68	5,3	4,73	-4,24	4,08	5,36	3,82
Kota Sungai Penuh	6,02	4,88	5,01	-0,16	3,67	4,45	4,74
Provinsi Jambi	4,6	4,69	4,35	-0,51	3,69	5,13	3,66

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2017 – 2022 mengalami fluktuasi dengan rata-rata perkembangan tahunan 3,66 persen. Hal ini diduga disebabkan oleh faktor kinerja keuangan daerah antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan dan rasio efisiensi.

Pengukuran kemampuan kinerja keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan. APBD merupakan instrumen kebijakan yang paling utama untuk pemerintah daerah. Di bawah ini adalah gambaran perkembangan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2022 yang dapat dilihat pada tabel 1.2 dan 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Realisasi APBD Berdasarkan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2022

Kabupaten Kota	Pendapatan (Ribu Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	1.181.842.755	1.290.418.835	1.408.461.829	1.203.597.144	1.211.203.530	1.301.031.398
Merangin	1.401.612.272	1.357.642.467	1.497.443.153	1.370.620.154	1.367.122.049	1.404.680.964
Sarolangun	1.264.611.914	1.365.193.291	1.433.000.521	1.155.460.296	1.149.619.271	1.172.585.107
Batang Hari	1.207.156.522	1.223.476.264	1.393.999.590	1.197.376.863	1.284.859.823	1.359.003.603
Muaro Jambi	1.290.314.106	1.362.641.442	1.382.424.142	1.323.380.486	1.338.231.189	1.433.199.774
Tanjung Jabung Timur	1.167.856.544	1.212.649.259	1.225.249.382	1.052.605.270	1.199.712.766	1.296.405.979
Tanjung Jabung Barat	1.505.718.210	1.616.739.173	1.568.057.751	1.421.415.183	1.421.415.183	1.489.966.499
Tebo	1.023.078.134	1.148.064.441	1.157.330.855	1.085.601.956	1.038.176.777	1.146.703.968
Bungo	1.315.050.838	1.375.153.847	1.616.706.122	1.273.509.638	1.507.514.985	1.569.531.440
Kota Jambi	1.635.122.617	1.754.896.149	1.710.612.143	1.621.827.275	1.655.334.440	1.690.837.982
Kota Sungai Penuh	745.030.337	779.750.688	868.042.890	749.342.007	767.341.775	782.779.078
Provinsi Jambi	13.737.394.249	14.486.625.856	15.261.328.378	14.400.624.372	14.294.675.328	14.316.725.799

Sumber: jambiprov.go.id, Tahun 2017-2022

Dari tabel 1.2 dapat dilihat realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi selama 6 tahun terakhir pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada bagian Pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan hanya mengalami penurunan pada Tahun 2020 dan tahun 2021. Untuk realisasi pendapatan terbesar yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 15.261.328.378 ribu.

Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-

komponen yang terdapat pada anggaran. Perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran menurut Halim (2007) yang diukur dengan menggunakan beberapa rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan dan rasio efisiensi. Sejalan dengan tujuan analisis rasio keuangan, maka ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengetahui rasio kemandirian di Provinsi Jambi dari tahun 2018-2022 dapat dilihat dari realisasi PAD terhadap total atau realisasi pendapatan daerah. Semakin besar persentase dari PAD terhadap total pendapatan daerah maka semakin mandiri pemerintah daerah tersebut dalam menghimpun pendapatan. Untuk mengetahui rasio kemandirian daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Rasio Kemandirian Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	PAD (Rupiah)	Total Pendapatan (Rupiah)	Rasio Kemandirian (%)
2018	1.494.530.066.000	4.218.022.336.000	35,43
2019	1.644.614.031.296	4.575.000.000.000	35,95
2020	1.535.183.487.238	4.400.624.372.119	34,89
2021	1.433.185.000.000	4.284.875.328.808	33,45
2022	1.780.655.105.532	4.466.176.346.868	39,87
Rata- Rata			35,92

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa rasio kemandirian daerah di Provinsi Jambi selama tahun 2018-2022 adalah sebesar 35,92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi belum mandiri dalam membiayai belanja daerahnya, kontribusi terbesar pada sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer dari pusat.

Untuk mengetahui rasio efektivitas pendapatan di Provinsi Jambi dari tahun 2018-2022 dapat dilihat dari anggaran pendapatan terhadap realisasi pendapatan daerah. Semakin besar persentase anggaran pendapatan terhadap realisasi pendapatan daerah maka semakin efektif pemerintah daerah tersebut dalam menghimpun pendapatan. Untuk mengetahui rasio efektivitas pendapatan Provinsi Jambi selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4 Rasio efektivitas pendapatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rupiah)	Realisasi Pendapatan (Rupiah)	Rasio Efektivitas (%)
2018	4.218.022.336.599,00	4.218.022.336.000	100,00
2019	4.566.472.026.795,00	4.575.000.000.000	100,19
2020	4.176.315.760.182,00	4.400.624.372.119	105,37
2021	4.284.875.328.808	4.284.875.328.808	100,00
2022	4.215.309.003.799	4.466.176.346.868	105,95
Rata-Rata			102,30

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa rasio efektivitas pendapatan di Provinsi Jambi selama tahun 2018-2022 adalah rata-rata sebesar 102,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi sangat efektif dalam merealisasikan pendapatannya, namun hal tersebut tidak didukung dengan kemandirian daerahnya.

Untuk mengetahui rasio efisiensi di Provinsi Jambi dari tahun 2018-2022 dapat dilihat dari realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah. Semakin kecil persentase realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah maka semakin efisiensi pemerintah daerah tersebut dalam menggunakan belanjaja daerah untuk

menghimpun pendapatan. Untuk mengetahui rasio efisiensi Provinsi Jambi selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Rasio Efisiensi Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan	Rasio
	(Rupiah)	(Rupiah)	Efisiensi (%)
2018	4.515.143.629.000	4.218.022.336.000	107,04
2019	4.824.366.351.412	4.575.000.000.000	105,45
2020	5.244.838.971.000	4.400.624.372.119	119,18
2021	4.430.392.751.000	4.284.875.328.808	103,40
2022	4.795.846.912.107	4.466.176.346.868	107,38
Rata-Rata			108,49

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1.5 dapat dilihat bahwa rasio efisiensi di Provinsi Jambi selama tahun 2018-2022 adalah rata-rata sebesar 108,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi dalam menggunakan anggarannya tidak efisien. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah harus meningkatkan kemandirian daerahnya agar dapat membiayai seluruh belanja daerah tanpa defisit.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kumpangpune (2019) yang meneliti tentang Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan 3 rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan dan rasio efisiensi. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan dan rasio efisiensi sebagai variable bebas dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Studi Komparatif dan Kinerja Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan dan rasio efisiensi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan dan rasio efisiensi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a) Dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai kinerja keuangan pada pemerintah daerah.
- b) Dapat sebagai bahan kajian atau bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Akademis

- a) Dapat dijadikan sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya serta mempunyai kegunaan sebagai pengembangan ilmu ekonomi terutama ekonomi pembangunan.
- b) Memberikan wawasan dan pemahaman mengenai perhitungan analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah.